GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional **Tgl/Bln/Thn : 12 Desember 2007**

Subyek : Perubahan Iklim **Hari : Rabu**

Halaman : 03

Pembangunan Ramah Lingkungan Perlu Ditingkatkan

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, upaya pembangunan yang ramah lingkungan seharusnya bisa lebih ditingkatkan, sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa merusak lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan Menkeu dari 20 negara di Jimbaran, Bali hari in (11/12). “Ini penting karena kita dalam pertemuan *finance and development minister* ini ingin menekankan bahwa isu *climate change* dan pembangunan (*development*) tidak berkompetisi. Itu harus saling mendukung,” katanya di sela pertemuan para Menkeu di Jimbaran, Bali (10/12).

Bagi Indonesia, kata dia, keterkaitan antara pembanguan dan perubahan iklim sangat tepat mengingat masalah reboisasi hutan sejak dulu datang dari komunitas warga miskin yang bermukim di pinggiran hutan. “Itu terkait juga dengan aktivitas ekonomi yang bisa menggeneralisasi *climate change* yang berhubungan langsung dengan *poverty reduction*," ujarnya.

Untuk itu pemerintah akan mengalamatkan langkah antisipasi perubahan iklim melalui pengembangan kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang mendiami lokasi sekitar hutan.

Pada dasarnya ada tiga topik isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, membicarakan tentang kuantitas masalah *climate change* dari sisi ekonomi dan finansial. Berdasarkan studi dari *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCC) terdapat kebutuhan anggaran sebesar US $200 miliar untuk program pengembangan lingkungan hidup hingga tahun 2030. “Ini penting karena telah menimbulkan kecurigaan antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang curiga bahwa isu *climate change* ini adalah alat lain bagi negara maju untuk menghambat negara berkembang membangun lebih maju. Atau dengan membebani negara berkembang, membangun dengan biaya yang lebih besar lagi sehingga mereka tidak meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia menjelaskan.

Kedua dari pertemuan tersebut adalah mengenai eksplorasi instrumen kebijakan terkait *climate change* tersebut. Hal itu untuk mensinergikan isu *climate change* dan pembangunan ekonomi. “Kita akan eksplor semua instrumen yang mungkin, tidak hanya *public funding* tetapi juga memobilisasi sektor swasta,” katanya.

Sementara isu ketiga membahas tujuan umum dari *climate change*, terutama dari sisi kebijakan fiskal.

Menurut Menkeu, isu *climate change* tidak cukup dengan upaya pencegahan kerusakan hutan. Pasalnya, ada juga *law enforcement* yang selalu tidak sejalan akibat banyak sekali kompleksitas pada institusi pusat, daerah, maupun penegak hukum.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Keterlibatan Swasta

Sementara itu, pembangunan ekonomi ramah lingkungan juga terbuka bagi pihak swasta melalui *private sector chanelling*. “Bisa B to B (antara swasta dengan swasta) dengan arahan kebijakan pemerintah. Misalnya beberapa perusahaan bisa adopsi teknologi negara tetangga dengan syarat masuk rezim pajak,” ujarnya.

Dengan demikian pihak swata dapat melakukan kerjasama multilateral atau melakukan *joint effort*. Untuk itu pemerintah akan mengupayakan berbagai skema untuk menarik minat swasta terhadap pembangunan lingkungan.sar modal atau apa,” katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP